

**SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DALAM  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

**(Studi Di Kota Batu)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SELPINA**

**NIM: 2017210142**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Penelitian skripsi ini dilakukan setelah melihat sebuah masalah yang ada pada pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana masih banyak ketidakadilan dalam penempatan jabatannya, dan seakan menjadi ladang basah untuk melakukan lelang jabatan. Dengan masalah tersebut muncullah sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang mana digunakan untuk mendukung kinerja pemerintah guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun dalam hal ASN. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dalam manajemen aparatur sipil Negara Kota Batu, kedua untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat di dalam manfaat sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dalam manajemen aparatur sipil Negara Kota Batu. Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi mulai dari wawancara, observasi kemudian dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil pertama yaitu secara umum pengembangan SPK dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batu selalu berlandaskan undang-undang yang mengatur tentang SAPK dalam prosesnya bisa dilihat dari tiga aspek *Support*, *Capacity* dan *Value*. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam penerapan SAPK di BKPSDM Kota Batu meliputi adanya dukungan dari Pemerintah baik itu sarana dan prasarana yang memadai, selain pendukung ada juga beberapa faktor penghambatnya yaitu adanya beberapa pegawai yang bandel, selain itu juga server pusat dalam kondisi kecepatan yang tidak baik, operator yang memiliki latar belakang bukan dari sekolah teknik informatika sehingga kesulitan dalam memahami teknologi informasi.

**Kata Kunci:** SAPK dan MANAJEMEN ASN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tiga fungsi yang tercantum didalam aturan-aturan kepegawaian, yakni : melaksanakan semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, melayani masyarakat dengan bersih dan ikhlas, serta sebagai fasilitator dalam mempersatukan bangsa dan memfilter segala hal yang dirasa kurang baik dan berpotensi menjadi perpecahan bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu sebuah manajemen kepegawaian untuk mengkoordinir ASN supaya menjalankan fungsinya dengan maksimal. Dalam memaksimalkan manajemen kepegawaian tersebut diperlukan sebuah sistem khusus yang akan mendukung fungsi ASN dengan baik. manajemen kepegawaian tersebut terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan terhadap ASN, pengadaan ASN secara jujur dan bersih, mengatur kepangkatan dan jabatan ASN, penghargaan, Penggajian, penilaian kinerja, aturan disiplin kerja, tunjangan, jaminan pension, jaminan hari tua, perlindungan serta pemberhentian. Pelaksanaan manajemen ASN tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sehingga terdapat kepastian terhadap ASN dalam menjalankan fungsinya.

Ternyata dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah yang harus dihadapi pemerintah dalam menjalankan manajemen kepegawaian. Masalah kepegawaian ini tidak dapat dipungkiri juga dapat terjadi di segala tempat baik dipusat maupun didaerah. Seperti adanya jenjang karier yang masih terkesan

*like & dislike* sehingga proses penempatan pegawai saat mutasi masih diwarnai dengan ketidakadilan, lebih parahnya lagi sejumlah pegawai yang memiliki catatan buruk justru mendapatkan jabatan strategis (sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/86621> mutasi jabatan tidak adil, diakses pada 10/11/2020) adanya praktik jual beli Jabatan Kementerian Agama di Jawa Timur setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) (sumber : <https://tirto.id/kpk-duga-jual-beli-jabatan-kejadian-ini-tidak-hanya-terjadi-di-jawa-timur>, diakses pada 10/11/20). Mekanisme lelang jabatan yang seharusnya sesuai dengan hasil *fit and proper test* malah menjadi ladang basah untuk melakukan lelang jabatan dalam tanda kutip.

Munculnya masalah mengenai manajemen ASN membuat pemerintah harus berpikir sangat keras untuk merumuskan bentuk manajemen kepegawaian yang lebih baik, sehingga permasalahan yang selama ini muncul bisa diminimalisir. Teknologi informasi sekarang ini menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan pada setiap aktivitas. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi ini adalah komputer beserta jaringan internet. Dengan perangkat komputer ini, seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan secara cepat dan efisien sehingga sangat bermanfaat bagi proses kinerja manusia terutama di sektor pemerintah yang biasa kita kenal dengan *E-Government*. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem teknologi dalam mendukung kerja pemerintah. Untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat maupun memberi layanan dalam hal ini adalah ASN.

Sistem informasi ASN sebagai salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam instansi *Public* (Pemerintah). adanya pemanfaatan teknologi mendorong munculnya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh BKD Kota Batu sebagai suatu aplikasi manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Batu, dengan harapan mampu mengoptimalkan manajemen kepegawaian disana. sehingga harapan *clean government* dalam pemerintah bisa tercapai. Tujuan awal dari SAPK ini sangatlah baik dan memudahkan dalam manajemen kepegawaian pemerintah di Kota Batu, namun terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti hasil penelitian dari Rochmah dan Soekanto(2015) yang menjelaskan bahwa adanya koordinasi yang belum efektif antara pegawai dan juga operator SAPK yang kurang berkompeten sehingga pelaksanaan SAPK ini belum optimal dari uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang “**Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batu**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat di dalam Manfaat Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batu.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kota Batu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan tentang Sistem Pelayanan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- b. Penelitian itu diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat menahan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain *studi* di Perguruan Tinggi.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai input untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan sistem yang dibuat oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kpepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.2016. *Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian*. Diakses dari <https://bkd.trenggalekkab.go.id/layanan-kepegawaian/bidang-forin/sapk-sistem-aplikasipelayanankepegawaian/#:~:text=SAPK%20adalah%20sistem%20informasi%20berbasis,sedemikian%20rupa%20untuk%20pelayanan%20kepegawaian,pada21/11/2020>.
- Badan Kepegawaian Negara. 2014. *Siatem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian* Diakses dari <https://www.bkn.go.id/produk/sistem-aplikasi-pelayanan-kepegawaian-sapk>,pada 21/11/2020.